

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK UPAH MENGUPAH
DALAM PENGAIRAN SAWAH DENGAN SISTEM LAJUR
(Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

SUMARTINI

NPM: 1521030285

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/ 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK UPAH MENGUPAH
DALAM PENGAIRAN SAWAH DENGAN SISTEM LAJUR
(Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

SUMARTINI

NPM: 1521030285

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I :Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H

Pembimbing II :Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag., M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/ 2019 M**

ABSTRAK

Muamalah merupakan aturan-aturan hukum Islam yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia. Salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan adalah upah mengupah (*ijarah*). Upah adalah pemindahan atau pemberian hak pemanfaatan jasa berupa imbalan yang diberikan kepada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Praktik upah mengupah yang dilakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, yaitu kerjasama dalam bidang pengairan yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan pertanian. Kerjasama bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, pihak petani memperoleh keuntungan berupa tersedianya air dan pihak jasa pengairan mendapatkan upah sebesar 2 bakul padi atau jika diuangkan senilai Rp. 40.000 setiap bakulnya dari 5 lajur tanah yang pembayaran upahnya ditangguhkan sampai musim panen. Pelaksanaan akad *ijarah* di Desa Sidodadi terjadi secara lisan berdasarkan saling percaya diantara kedua belah pihak.

Permasalahan ini mengangkat rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana praktik upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus (2) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur dan pandangan hukum Islam tentang praktek upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

Adapun metode ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, serta data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) dan observasi. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisa data, menggunakan metode kualitatif. Pengolahan data dilakukan secara editing dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan, bahwa pelaksanaan akad *ijarah* dalam bidang pengairan di Desa Sidodadi dengan upah yang di bayarkan setelah panen sah dalam hukum Islam karena telah sesuai rukun dan syarat *ijarah* dengan pembayaran upah senilai 2 bakul padi atau jika diuangkan senilai Rp 40.000 setiap bakulnya dari 5 lajur sawah. Sedangkan tinjauan hukum Islam tentang praktik upah mengupah yang dimana ada sebagian petani tidak membayarkan upah sesuai dengan akad yang disepakati yakni sebesar 2 bakul padi tersebut belum memenuhi rukun dan syarat *ijarah* sehingga tidak sah dalam hukum Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jalan Let Kol. H. Endro Suratinin Sukarame Bandar Lampung Tlp. 0721703289

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK UPAH
MENGUPAH DALAM PENGAIRAN SAWAH DENGAN
SISTEM LAJUR (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka
Kabupaten Tanggamus)**

**Nama : Sumartini
Npm : 1521030285
Prodi : Muamalah
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP: 197208262003121002**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag
NIP: 19780725009121002**

**Ketua
Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jalan Let Kol. H. Endro Suratinin Sukarame Bandar Lampung Tlp.0721703289

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
UPAH MENGUPAH DALAM PENGAIRAN SAWAH DENGAN SISTEM

LAJUR" (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)

disusun oleh Sumartini, NPM: 1521030285, Program studi Hukum Ekonomi

Syariah. Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden

Intan Pada Hari/Tanggal Senin 14 Oktober 2019

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Jayusman, M. Ag

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag

Penguji : Relit Nur-Edi, S.Ag., M.Kom.I

Penguji Pendamping I : Dr. H. A. Kumedri Ja'far, S.Ag. M.H

Penguji Pendamping II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag. M. Ag

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khoiruddin, M.H

NIP: 19580824198031003

MOTTO

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *أَعْطُوا لَاحِقَ جِزْرِ أَجْرِهِ، قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْقُهُ* (رواه ابن ماجه)¹

"Artinya: Al-Abbas Ibn al-Walid al-Dimasyqi menceritakan, Wahb Ibn Said

Athiyah al-Sulami menceritakan, Abd al-Rahman Ibn Zaid Ibn Aslan

menceritakan dari bapaknya, dari Abdillah Ibn Umar r.a dijelaskan bahwa rasullah Saw bersabda: *"Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering"*

(HR. Ibnu Majah).

¹ Ibnu Hajar Alasqoni, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Darun Nasyr Al Misiryiyah, t.th), h. 188

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhitung kepada:

1. Yang tercinta Bapakku Slamet dan Mamakku Tuminem yang telah melahirkan ku, membesarkanku, membimbingku, dan yang senantiasa selalu berdo'a tabah dan sabar demi kesuksesanku. Walaupun jauh dimata namun lantunan doa'anya mampu kerasakan. Kulihat getar-getar bibir serta air mata tulus yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup ini. Terima kasih atas kasih sayang dan perjuangan sepanjang hidupku.
2. Saudara-saudara ku, Mbak Semi, Kang Santo, Mbak Riyana, Kak Basri, Mas Agus Budiono, Mbak Desi Wahyuni serta adiku Retno Utami, yang telah memberiku dukungan dan semangat tanpa henti, serta keponakanku Mahfudin Ilyas, Bani Mutakin, Aqilah Hasnah Nadiah dan Alwi Ahmad Abbasy atas senyumannya.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman yang akan selalu aku kenang

RIWAYAH HIDUP

Sumartini di lahirkan di Desa Palas Jaya, pada tanggal 28 Juli 1996. Anak keempat dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Slamet dan Ibu Tuminem. Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar dimulai di SDN 02 Palas Jaya pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Nurul Huda Palas pada tahun 2009 dan selesai tahun 2012, kemudian melanjutkan sekolah di SMK Cahya Kartika Palas tahun 2012 dan selesai 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di IAIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Bandar Lampung, 14 Oktober 2019

Penulis

Sumartini

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Alhamdulillahirobbil'aalamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK UPAH MENGUPAH DALAM PENGAIRAN SAWAH DENGAN SISTEM LAJUR “** (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus). Karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Do'a keselamatan dan kesejahteraan mudah-mudahan terus dilimpahkan atas Muhammad SAW. Yang mana tanpa lelah berdakwah mengajak manusia untuk kembali kejalan yang lurus dan mengajarkan kepada manusia pentingnya ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban. Terima kasih diucapkan kepada pihak-pihak dibawah ini yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Rektor Prof Dr. Muhammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. K.H. Khairuddin, M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag, M.H selaku Pembimbing I serta Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memberi motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai
3. Khoiruddin, M.S.I dan Juhrotul Kulwah, M.S.I selaku ketua dan sekertaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah Faluktas Syariah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak dan ibu dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus.

5. Semua guru-guruku yang telah memberikan ilmu yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepadaku hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf maupun pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini
7. Sahabat-sahabatku Wahyu Puji Astuti, Zeliana Triutari, Nur arsilah, Lailatul Hikmah, Siti Syariah, Tri Atma Yulianti, Ellena Agustin, Mustakim, dan Hartini yang selalu memberikan semangat yang luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini. .
8. Seluruh teman seperjuangan Muamalah angkatan 2015 khususnya Muamalah F, teman-teman KKN kelompok 12 dan PPS, dan seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan serta kesan terbaik selama berada di kampus UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk pembaca. Aamiin...

Bandar Lampung, 14 Oktober 2019
Penulis

Sumartini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikasi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian	8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Upah

a) Pengertian upah (<i>ijarah</i>).....	14
b) Dasar hukum upah (<i>ijarah</i>)	19
c) Rukun dan syarat upah (<i>ijarah</i>).....	27
d) Macam-macam upah (<i>ijarah</i>).....	35
e) Hak menerima upah (<i>ijarah</i>)	39
f) Waktu pembayaran upah (<i>Ijarah</i>)	40
g) Berakhirnya akad upah mengupah	40

2. Air

a) Pengertian Air.....	42
b) Macam- Macam Air	44
c) Manfaat Air Bagi Kepentingan Umum	47

B. Tinjauan Pustaka	47
---------------------------	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya Desa Sidodadi Kecamatan Semaka
Kabupaten Tanggamus 51
2. Keadaan penduduk Desa Sidodadi Kecamatan Semaka
Kabupaten Tanggamus 51
3. Letak geografis Desa Sidodadi Kecamatan Semaka
Kabupaten Tanggamus52
4. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Sidodadi Kecamatan
Semaka Kabupaten Tanggamus 54
5. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Sidodadi Kecamatan
Semaka Kabupaten Tanggamus 54
6. Struktur organisasi Desa Sidodadi Kecamatan Semaka
Kabupaten Tanggamus 56
7. Visi Dan Misi Desa Sidodadi Kecamatan Semaka
Kabupaten Tanggamus 57

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Sistem Pengairan Sawah Pada Masyarakat Desa Sidodadi
Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus..... 58
2. Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan
Sistem Lajur 60

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

1. Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan
Sistem Lajur Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka
Kabupaten Tanggamus 66
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah
Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur Di Desa
Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus..... 68

B. Pembahasan 73

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 74
- B. Rekomendasi 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Roset Dari Kesatuan Bangsa Dan Politik Bandar Lampung
Lampiran 2	Surat Izin Riset Dari Kesatuan Bangsa Dan Politik Tanggamus
Lampiran 3	Surat Keterangan Izin Riset Dari Pekon Sidodadi
Lampiran 4	Surat Keterangan Seminar Judul
Lampiran 5	Pedoman Wawancara
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
Lampiran 8	Surat Bukti Tidak Plagiarisme

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk Pekon Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.....	53
2. Perincian Penduduk Menurut Lulusan Pendidikan Umum di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus...	53
3. Perincian Jumlah Penduduk Pekon Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus	53
4. Mata Pencaharian Pekon Sidodadi	54
5. Perincian Penduduk Menurut Agama di desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus	55
6. Perincian Bangunan Peribadahan Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus	56
7. Stuktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus	57
8. Luas Lahan Yang Dikerjakan.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini, maka akan ditegaskan makna beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini.

Adapun judul proposal ini adalah **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)** Untuk itu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Tinjauan

adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹

2. Hukum Islam

adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Quran maupun al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada *zaman* (waktu) dan *makan* (ruang) manusia.²

¹Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-4(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008),h. 170

²Said Agi Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta:Pemadani,2005),h. 6

3. Upah

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang di maksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah di sepakati.³

4. Pengairan

adalah pekerjaan yang bertalian dengan penyediaan air untuk pertanian dengan bendungan, Bandar, terusan,dan sebagainya. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi.⁴

5. Sistem Lajur

adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks⁵ Lajur adalah deretan, beberapa benda yang merupakan baris atau banjar, kolom, baris tebal memanjang.⁶ atau sistem lajur adalah pembayaran upah berupa hasil panen atau padi dengan besaran upahnya berdasarkan perlajur sawah, atau petakan lahan

³Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, Cetakanke1 (Lampung : Permatanet,2016),h. 103

⁴Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-4,.....h. 733

⁵ Marimin, *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bogor:Grasindo,2006), h. 1

⁶Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-4,....h. 173

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud judul skripsi ini adalah mengaji Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus).

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus). adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Praktik upah mengupah dalam pengairan sawah sering terjadi di antara petani dan jasa pengairan, sehingga penelitian dianggap perlu dan menulis tertarik untuk menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.
- b. Desa sidodadi belum pernah ada yang membahas tentang praktik upah mengupah dalam pengairan sawah.

2. Alasan Subjektif

Disamping itu juga ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang di pelajari sebagai mahasiswa syariah prodi muamalah.

C. Latar Belakang

Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Dalam arti sempit, fiqh muamalah menekankan keharusan antar manusia dengan cara memperoleh mengatur, mengelola, dan mengembangkan Mal (harta benda). Adapun yang termasuk dalam muamalah antara lain tukar menukar barang, jual beli, pinjam meminjam, upah kerja, serikat dalam usaha dan lain-lain.

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam literatur fiqh disebut dengan akad *Ijarah al-'amal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.⁷ Dalam ajaran Islam, bekerja merupakan suatu keharusan bagi pemeluknya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.(QS At- Taubah 105).⁸

Salah satu kegiatan transaksi dalam Islam adalah sewa-menyewa yang disebut *ijarah*. *Ijarah* disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi

⁷Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 215

⁸Dapartemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2015), h. 203

juga tenaga atau jasa dengan imbalan yang di sebut dengan upah. *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalanya, di terjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah menguapah.⁹

Obyek *ijarah* harus di ketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahkan terimakan secara langsung, pemanfaatanya tidak bertentangan dengan hukum syara, obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi obyek *ijarah* adalah harta yang bersifat *isti'maly*. Untuk terpenuhnya transaksi *ijarah* harus ada *mu'jir* (orang yang memberikan upah) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah).

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya, ia menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.¹⁰ Pada dasarnya manusia bekerja karena ada motivasi dalam diri seseorang. Motivasi tersebut mendorong manusia untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu upah biasa dijadikan sebagai tolak ukur prestasi kerja. Karena upah merupakan suatu dorongan untuk meningkatkan kinerja bagi seseorang.

Salah satu bentuk akad *ijarah* yang dilakukan petani di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus adalah dengan sistem irigasi sawah yang menggunakan air sungai/bendungan oleh jasa

⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 115

¹⁰Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta:Gema Imani Press, 2005), h.488

pengairan untuk mengalir sawah petani. Jasa pengairan memiliki beberapa pekerjaan di antaranya membantu mengatur lancarnya proses irigasi.

Sistem pengupahan pada irigasi ini adalah sesuai luas lahan pertanian yang diairi air, setiap wilayah mempunyai standar tertentu, tetapi di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus umumnya untuk irigasi dilakukan perlajur lahan dan upah yang diberikan ditangguhkan hingga masa panen dengan syarat jika panen bagus maka petugas irigasi akan mendapatkan gabah atau padi senilai 2 bakul (rinjing) atau jika diuangkan senilai Rp40.000 perbakul, dengan pembayaran ditangguhkan sampai panen padi. Permasalahan dalam masyarakat ada sebagian petani yang tidak memberikan upah tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, sehingga *musta'jir* sering mengalami kerugian. Namun *musta'jir* tidak dapat menuntut haknya karena tidak adanya perjanjian dengan jelas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka sangat penting untuk diteliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dengan pemahaman lebih jelas mengenai transaksi upah mengupah tersebut dengan tinjauan hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas maka akan dikaji dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam khususnya fiqh muamalah yang terkait dengan pelaksanaan praktik upah mengupah dalam pengairan sawah. Karena penelitian difokuskan pada “Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus”.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok masalah yang hendak di kembangkan, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus?

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktek upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

1. Signifikasi secara teoritis Hasil penelitian diharapkan akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang terlibat dalam pelaksanaan praktik upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur, serta mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam.
2. Signifikasi secara praktis penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat baik yang melakukan praktik maupun tidak, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya di peroleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa

yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.¹¹ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti Praktik upah mengupah yang terjadi di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada.¹² Dalam penelitian ini, maksudnya adalah suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana praktik upah mengupah yang terjadi di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang teliti. Data primer yang di dapat dari penelitian ini adalah dengan wawancara dengan jasa pengairan dan petani desa Sidodadi.

¹¹Sugiono.*Metode Penelitian Pendidikan*, Cet ke-21 (Bandung: Alfabeta CV,2015), h. 6

¹²Moh.Pabuda Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),h.10

b. Sumber data sukunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹³

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁴ Adapun yang menjadi bagian dari populasi dari penelitian ini adalah dari petani di Desa Sidodadi berjumlah 10 petani dan 2 pengelola irigasi.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau jumlah wakil populasi yang diteliti.¹⁵ Sample ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sample ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar perkiraan maka apabila subjek kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Jumlah populasinya kurang dari 100 orang, yakni 12 orang, maka seluruhnya dijadikan sampel, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi.

¹³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), h. 51

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 173

¹⁵ *Ibid*

5. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting. Oleh karena data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, dan komprehensif bagi persoalan yang diteliti.¹⁶ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.¹⁷ Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan ditempat yakni di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Untuk mencari data yang berkaitan dengan praktik upah mengupah antara petani dan jasa pengairan.

b. Metode Wawancara (Interview)

Metode wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.¹⁸ *Interview* di lakukan dengan pihak petanidan jasa pengairan serta warga sekitar terkait praktik upah mengupah dalam pengairan sawah

¹⁶ Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*,h. 83

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan*,h. 74

¹⁸ *Ibid*

dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable, berupa foto, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

6. Metode pengolahan data

a. Tahap Pemeriksaan data (editing)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang sudah masuk terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁹ Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. Sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Tahap Sistematika data

Bertujuan menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²⁰

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam

¹⁹Abdulkadir Muhamad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 48

²⁰ *Ibid*

Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur Studi di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem upah mengupah pengairan sawah di Desa Sidodadi. Tujuan dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai sistem upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi dalam tinjauan atau pandangan hukum Islam.

Metode berfikir ilmiah dalam penulisan ini adalah menggunakan cara deduktif yaitu metode analisa dengan cara bermula dari data bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.²¹ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan sistem upah bagi upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus ditinjau dari hukum Islam.

²¹Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumoi Aksara, 2008),h. 85

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Upah

a. Pengertian Upah (*ijarah*)

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.¹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan dalam produksi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.² Dalam Peraturan Pemerintah Nomer 78 Tahun 2015 Pasal 1 upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian pekerja atau kesepakatan.³

¹ Al-Faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h. 361

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 2, Cetakan 3*, (Jakarta, Balai Pustaka 1994), h. 1108

³ Peraturan Pemerintah Ri No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 1, h. 2

Adapun dalam Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2001 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut sesuatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan undang-undang, termasuk tunjangan bagi pekerja buruh dan keluarganya atau pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.⁴ Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah memberikan sesuatu imbalan kepada pekerja atau buruh yang telah melakukan pekerjaan.

Pengertian upah (*Ijarah*) menurut Islam yaitu *ijarah* menurut bahasa merupakan devasi dari kata *al-ajr* yang berarti upah.⁵ Upah dalam bahasa arab disebut *al-ujrah*, dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti “*iwad*” (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.⁶ *Ijarah* ialah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan satu pekerjaan sebagai balasan pekerjaanya.⁷ Jadi *ijarah* menurut bahasa dan secara syara’ memiliki makna jual beli manfaat.⁸

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, h. 2

⁵Nandang Burhanudin, *Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam*, (Bandung: Cv Media Fitrah Rabbani & Ypm Darussalam Kutai, 2010), h. 155

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Bandung: PT Alma’arif, 1987), h. 7

⁷Rachmad, Syafii, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), h. 121

⁸Eka Nuraini rachmawati & Ab Mumin ,Bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Persepektif Fikih Dan Praktiknya Dipasar Modal Indonesia”, AL ADALAH, Vol XII, No. 4, 2015

Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkan dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya. Allah menghalalkan upah karena merupakan kompensasi atas jasa-jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan perbuatan buruk yang akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah Swt.⁹

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *Ijarah*, bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (*ujroh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁰

Sedangkan menurut istilah beberapa ulama mendefinisikan sebagai berikut :

a) Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan

الْإِجَارَةُ شَرْعًا عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“akad ijarah secara istilah adalah akad atas manfaat dengan imbalan (*ujrah*)”

b) Ulama Syafiiyah mendefinisikan dengan:

الْإِجَارَةُ هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدَلِ
وَالْأَبَا بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

⁹M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, AL'-ADALAH Vol. 14, Nomor 2, 2017

¹⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta:erlangga ,2014). h. 91

“Transaksi terhadap sesuatu manfaat uang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.

- c) Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

الْإِجَارُ تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ بِعَوَضٍ

“pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”¹¹

- d) Menurut Labib Mz yang dimaksud *ijarah* adalah memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain
- e) Menurut Hasbi Ash-Shidique bahwa *ijarah* adalah

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَوْ تَمْلِيْكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat untuk imbalan, sama dengan menjual manfaat”

- f) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.¹²

¹¹ Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah Amaliyah Akad Ijarah Dan Jualah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 4

- g) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.¹³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dengan demikian *ijarah* merupakan akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *muajir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pengantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijarah* tidak juga berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditujukan pada manfaat.

Demikian juga dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai obyek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam akad *ijârah* pekerjaan pada umum-nya akan ditawarkan kepada orang tertentu dengan kontrak yang jelas antara dua orang atau lebih.¹⁴ Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah

80 ¹² Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: bulan bintang 1974), h.

185 ¹³ Ismail Nawami, *Fikih Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor :Ghalia Indonesia ,2012), h.

¹⁴ Adur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing (Mlm)*, AL'-ADALAH Vol. XIII, 2016

menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.¹⁵

b. Dasar Hukum Upah (*ijarah*)

1) Dasar hukum upah dalam Al-Quran

Adapun dasar yang membolehkan upah, yang terdapat dalam al-Quran sebagai berikut :

- a) Surat At-Taubah [9] ayat 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya :Dan Katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (QS. At-Taubah [9]:105)¹⁶

Ayat di atas menjelaskan mengenai pertanggung jawaban dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang meneruskan kebathilan, kezhaliman, kesesatan dan penyimpangannya terhadap perintah-perintah-Nya. Ketika telah tiba waktunya pada hari kiamat, semua amal perbuatan

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011), h. 115.

¹⁶Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro,2015), h. 203

akan dipaparkan dihadapan-Nya, dihadapan Rasul-Nya dan dihadapan kaaum muslimin.¹⁷

b) Surah Al-Baqarah [2] ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan jika kamu ingin menyusukan anak mu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran de yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah [2] ayat 233).¹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.¹⁹

c) Surah At-Thalaq [65] ayat 6

¹⁷Syaik Abdurrahman bin nashir, *Tafsir Al-Quran*, (Jakarta: Darus Haq ,2016), h. 333

¹⁸Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*,.....h. 37

¹⁹Al-Imam Jalaluddin, Al-Imam jalaluddin Abdirrahman, *Tafsir Jalalain*, Cetakan II. (Surabaya : PT. Elba Fitrah Mndiri Sejahtera), 2015, h. 169-170.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
 لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
 حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ ۚ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (QS. At-Thalaq [65] ayat 6)²⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, kalau perempuan yang sudah diceraikan untuk menyusukan anaknya, berilah mereka upah atas kerjanya menyusukan itu dengan upah yang baik. Dan hal ini dirundingkan atau dimusyawarahkan dengan perempuan itu cara bagaimana penyelenggaraan penyusuan anak itu. “Tetapi jika kamu berada dalam kesukaran, dia disusukan oleh perempuan lain,” berarti jika tidak terdapat perdamaian diantaramu, umpamanya pihak laki-laki merasa keberatan anaknya disusukan oleh ibu anak itu karena ibunya menderita penyakit menular, atau meminta upah yang tinggi atau ibu anak itu tidak suka menyusukan anaknya, maka anak itu boleh

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*.....h. 599

disusukan oleh perempuan lain, sedangkan biayanya ditanggung oleh pihak laki-laki. Akad tetapi andai kata tidak ada perempuan lain yang akan menyusukan anak itu, wajiblah anak itu menyusukan anaknya.²¹

d) Surah Al-Qashash 26- 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَّابِتْ أَسْتَجِرُّهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ أَسْتَجَرْتُ
الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al-Qashas : 26-27)²²

Ayat di atas menjelaskan salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai Ayah, pekerjaan pemuda itu untuk menggembala atau mengurus domba piaraan kita dengan gaji

²¹Syeh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Prenada Media Group,2006), h. 611.

²²Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*,....h. 388

Sungguh, ia adalah orang yang paling baik yang engkau pekerjakan, karena tenaganya kuat dan dirinya dapat dipercaya." Syu'aib berkata kepada Musa, "Aku bermaksud mengawinkanmu dengan salah seorang putriku ini. Sebagai mas kawinnya, kamu harus bekerja pada kami selama delapan tahun. Tapi, jika kamu mau menggenapkannya mejadi sepuluh tahun dengan sukarela, maka itu baik saja. Tapi aku tidak mengharuskan dirimu memilih masa yang lebih panjang. Insya Allah kamu akan mendapatkan diriku sebagai orang yang saleh yang baik dalam bermuamalat dan menepati janji."²³

Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan, maka upah dalam konsep Islam adalah menekankan pada dua aspek, yaitu aspek dunia dan akhirat. Tetapi hal yang paling penting, adalah bahwa penekanan kepada akhirat itu lebih penting daripada penekanan terhadap kehidupan dunia (dalam hal ini materi).

2) **Dasar Hukum Upah dalam Hadis**

Hadis Riwayah Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ عَطِيَّةَ السُّلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

²³ Ahmad Muastofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: Cv. Toha Putra semarang, 1993), h. 84.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الْإِجْرَ جِيراً جِرَّهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)²⁴

Artinya: "Al-Abbas Ibn Al-Walid al-Dimasyqi menceritakan, Wahb Ibn Said Athiyah al-Sulami menceritakan, Abd al-Rahman Ibn Zaid Ibn Aslan menceritakan dari ayahnya, dari Abdilllah Ibn Umar r.a dijelaskan bahwa rasullah Saw bersabda: "Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis di atas, yang menjadi objek adalah manfaat atas kerja yang telah dilakukan oleh seseorang kemudian adanya upah padanya, hal ini yang menjadi landasan diperbolehkannya *ijarah*, sedangkan pada barang yakni manfaat dari suatu barang yang berpindah dan dikenakan upah atasnya.²⁵

Hadis Riwayah Abdul Razzaq dari Abu Hurairah

و عَنْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ
قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمَّ أَجْرَتُهُ²⁶

Artinya: Dari Abu said al-khudri ra. bahwa rasulloh Saw bersabda: "Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." (HR. Abdurrazzaq)

²⁴ Ibnu Hajar Alasqoni, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Darun Nasyr Al Misyriyyah, t.th), h. 188

²⁵ Darsono, Siti Astiyah, et. al, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 230.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid* Jus 2, (Semarang: Mukhtabah Usaha Keluarga), h. 165

Hadis di atas menjelaskan agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas dan diberitahukan betapa besar atau kecilnya upah pekerja.

Hadis Riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَاخَصْتُمُھُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي أَيِّ
حَلْفٍ بِاسْمِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ
اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه مسلم)²⁷

Artinya: dari Abu hurairah Ra rasullah SAW Bersada Allah berfirman, ‘Ada tiga orang yang aku menjadi musuhnya pada hari kiamat: seseorang yang member janji kepada-ku kemudian mengkhianati; seseorang yang menjual orang merdeka, lalu memakan harganya; Dan seseorang memperkerjakan seorang pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya” (HR. Muslim).”

Dalam Hadits di atas yang berkaitan dengan pembayaran upah yaitu pada poin terakhir, karena apabila telah memperkerjakan atau mengambil manfaat orang lain tanpa memberikan upah hal tersebut disamakan dengan memakan harta orang lain, yang seolah-olah telah memperbudaknya.

3) Dasar Hukum dalam Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.²⁸ Dan,

²⁷ Muhammad Bin Ismail al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, No 2227 (Berikut: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 531.

²⁸ Rachmad Syafii, *Fiqh Muamalah*,h. 124

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi dan di seluruh negeri sepakat diperbolehkannya *ijarah*.²⁹ Dari ketiga sumber hukum Islam, yaitu al-Quran, Hadis dan Ijma' telah meperbolehkannya *ijarah* dalam hal upah mengupah apabila sesuai dengan ajaran Islam.

4) Dasar Hukum dalam Undang-Undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan "Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan".³⁰

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah.

²⁹ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* Cetakan Ke- 4, (Yogyakarta: Mahtabah Al-Hanif, 2004), h. 316

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

c. Rukun dan Syarat Upah (*ijarah*)

1) Rukun Akad *Ijarah*

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri. Sebagai sebuah transaksi, *al-ijarah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun rukun akad *al-ijarah* sebagai berikut

a) *Shighat*

Ijab merupakan pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan Kabul adalah pernyataan

pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan Kabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.³¹ Ijab dan kabul dapat berupa pernyataan baik secara verbal maupun dalam bentuk lainnya.³² Shighat transaksi *ijarah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'qidain* yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, memperkerjakan dan lain sebagainya.³³ Ijab dan kabul terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

b) *Muta'qidain*

Ada dua orang yang melakukan akad upah mengupah yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan orang yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, *aqid* disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.³⁴

³¹Ambariyani & Wiwik Damayanti “Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah” ,(Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 1, Juni 2017), h. 115

³²Mohammad Heykal ,*Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis Dan Praktis* , (Jakarta: Kencana,2010), h. 81

³³ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* Cetakan Ke- 4

³⁴ Sohari Sahrani & Raufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 170

c) Upah (*ujrah*)

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.³⁵

d) Manfaat (*ma'jur*)

Manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja, penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*, apabila penggunaan *ma'jur* tidak digunakan berdasarkan aturan umum atau kebiasaan.

2) Syarat-Syarat Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* yang pertama kali harus dilihat terlebih dahulu adalah orang yang akan melakukan perjanjian tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya. Unsur yang penting diperhatikan kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk membedakan yang baik maupun yang buruk. Iman Syafii dan Hambali menambahkan satu syarat lagi yaitu harus dewasa (*baligh*). Perjanjian *ijarah* yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa (*baligh*) menurut

³⁵ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* Cetakan Ke- 4,....h. 318

keduanya tidak sah walaupun dapat membedakan yang benar dan buruk.

Menurut Nandang Burhanudin dalam buku Tafsir Al-Burhan edisi Al-Ahkam menjelaskan bahwa syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a) *Ijarah* tidak sah, kecuali dilakukan oleh orang yang boleh bertindak (berakal, baligh, merdeka, dan rasyid)
- b) Manfaat harus diketahui, sebab manfaat adalah objek akadnya, oleh karena itu mengetahui objek akad disyariatkan seperti jual beli.
- c) Upah yang diberikan harus diketahui, sebab ia merupakan upah akad tukar jasa ia wajib mengetahui upahnya seperti pembeli mengetahui harga barang.
- d) Manfaat yang dihasilkan haruslah mubah, maka tidak boleh mengambil upah dari zina, menyanyi, atau berbisnis alat yang melalaikan.
- e) Manfaat haruslah sesuatu yang dapat dipenuhi, oleh karena itu, tidak sah melakukan *ijarah* bagi orang yang tidak dapat memenuhi manfaat yang diharuskan.
- f) Manfaat haruslah dimiliki oleh orang yang melakukan *ijarah* atau orang yang mewakilinya, sebab *ijarah* menjual manfaat, maka tersebut sangatlah mutlak.

- g) Jangka waktu harus diketahui , maka tidak boleh melakukan *ijarah* dalam jangka waktu yang tidak diketahui, sebab akan melahirkan perselisahan.³⁶

Adapun menurut Rachmad Syafii dalam buku fiqh muamalah syarat-syarat *ijarah* terdiri dari empat macam yaitu sebagai berikut:

1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat *In'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid* zat akad dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah *aqid* (orang yang melakukan akad) disyariatkan harus berakal dan *mumayiz* (minimal 7 tahun), serta disyariatkan harus baligh. Sedangkan menurut ulama Malikiyah bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* dan jual beli. Sedangkan baligh adalah syarat penyerahannya saja. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafiiyah mensyariatkan orang harus mukalaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayiz* belum dikategorikan ahli akad.³⁷

2) Syarat pelaksanaan (*An-Nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian, *ijarah al-fadhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak menjadi akad *ijarah*

³⁶ Nandang Burhanudin, *Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam*,h. 156

³⁷ Rachmad Syafii, *Fiqh Muamalah*,h. 125

3) Syarat sah *ijarah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang akad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-aqad*). Untuk sahnya akad *ijarah* diperlukan syarat sebagai berikut:

a. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad

Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijarah*, maka tidak sah, berdalih kepada firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan sungguh Allah maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: (4) 29)³⁸

b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencengah terjadinya perselisihan.

Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakukan, menjelaskan masa sewa seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.

³⁸Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*,...h. 83

- c. Hendaknya barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.

Menurut mazhab Abu Hanifah, yaitu menyewakan barang yang tidak dapat dibagi tanpa dalam keadaan lengkap, hukumnya tidak boleh sebab manfaat kegunaannya tidak ditentukan. Sedangkan menurut jumhur ulama mengatakan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang yang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahan dapat cara persiapannya dapat dilakukan dengan mempretelinya atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana juga diperbolehkan dalam masalah jual beli.

- d. Objek akad ijarah harus di penuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. dengan demikian tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki seperti menyewakan kuda binal untuk di kendarai

- e. Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.

Maka tidak sah sewa menyewa dalam hal maksiat karena maksiat wajib ditinggalkan orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang secara aniaya, atau menyewakan rumahnya kepada orang yang menjual *khamar* atau untuk

digunakan main judi atau di jadikan gereja, maka menjadi *ijarah fasid*.³⁹

- f. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardu dan bukan kewajiban orang yang disewa (ajir) sebelum dilakukannya *ijarah*. hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu.⁴⁰
- 4) Syarat kelaziman

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal berikut:

- 1) Barang sewaan terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat barang sewaan, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

- 2) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam, pertama uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia, kedua uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain,

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*,.....h. 19

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta; Amzah, 2010), h. 324

kecuali menjualnya. Ketiga uzur pada barang yang disewa, seperti penyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah. Adapun menurut ulama Syafiiyah, jika tidak ada uzur, *ijarah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijarah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang.⁴¹

d. Macam-macam Upah (*ijarah*)

Dalam fiqh muamalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
2. Upah yang sepadan (*anjrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarah*nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* di bagi menjadi dua :

- a) *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir*, mempunyai benda-benda tertentudan *muta'jjir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jjir*, dan *musta'jjir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang

⁴¹Rachmad Syafii ,*Fiqh Muamalah*,...h. 129

bolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

- b) *Ijarah* yang bersifat pekerja (*ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian *musta'jjir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jjir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.⁴²

Adapun awalnya jenis upah hanya terbatas pada beberapa jenis saja, namun seiring perkembangan zaman dalam muamalah saat ini jenisnya semakin beragam diantaranya:

- a. Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) Adzan, Iqamat, Mengajarkan al-Quran, Fiqih, Hadis Badal Haji, dan Qadha.

Ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk salat, atau puasa atau mengerjakan haji, atau membaca al-Quran yang pahalanya di hadiahkan kepada (yang menyewa), atau untuk adzan, atau tidak mejadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu, tidak bolehkan, dan hukumnya

⁴²M.I Yusato Dan Mk Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insni Press, 2002), h. 67

haram mengambil upah tersebut, Menurut mazhab Hambali *ijarah* dalam perbuatan ini tidak bisa kecuali menjadi perbuatan *taqarrub* bagi si pelakunya, dan diharamkan mengambil bayaran untuk perbuatan tersebut, mereka mengatakan boleh mengambil rezeki dari baitulmal atau dari wakaf untuk perbuatan yang mengalirkan manfaat, seperti *yadha*.

Pengajarana al-Quran, hadis fiqih, badal, haji, menanggung syahadat (kesaksian) dan melaksanakan serta adzan dan seumpamanya. Adapun menurut Mahzab maliki, Asy Syafii dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan al-Quran dan ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan “pengimbalan untuk mengajarkan al-Quran dan pengajaran ilmu dibolehkan, baik secara bulanan maupun sekaligus semua itu boleh untuk pengobatan, menulis aluran dan menulis buku-buku pengetahuan (juga boleh) karena nash pelarangnya tidak ada bahkan yang ada di perbolehkan.

Abu Hanifah berpendapat untuk tidak boleh, mengambil imbalan dalam kaitannya dengan perbuatan taat. Sementara Malik berpendapat boleh mengambil imbalan untuk mengajar al-Quran, boleh pula mengambilnya untuk

adzan dan haji. Menurut imam Asy Syafi'i pengimbalan haji dibolehkan untuk mengimbalan imam dan shalat fardu tidak dibolehkan. Pengimbalan pengajaran berhitung /matematika, khat, bahasa, sastra, fiqih, hadist, membangun masjid dan madrasah dibolehkan. Menurut mazhab Asy Syafi'i, imbalan memandikan mayit, mentaqinkan dan memandikannya boleh.

Adapun menurut Abu Hanifah tidak boleh menerima imbalan untuk memandikan mayit, akan tetapi untuk menggali dan membawa boleh.⁴³ Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan upah dalam hal ibadah seperti yang dijelaskan di atas adalah boleh karena membawa kemaslahatan bagi individu dan umat dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Selain itu, karena biasanya orang yang mengabdikan diri untuk mengajar telah menghabiskan waktu dan aktifitasnya itu sehingga tidak ada waktu untuk mencari nafkah. Demikian ini sesuai dengan fatwa ulama Saudi.⁴⁴

b. Upah menyusui anak

Dalam al-Quran sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 233.

c. Pengupahan bekam

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*,h. 14-18

⁴⁴ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, cetakan 4,h. 323

Usaha bekam tidak haram, karena nabi Saw pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan, kepada tukang bekam itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.

e. Hak Menerima Upah (*ijarah*)

1) Selesai bekerja

Berdalihkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi Saw, Bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا لَاجِرٍ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ» (رواه ابن ماجه)⁴⁵

Artinya: al-Abbasi Ibn Al-Walid al-Dimasyqi menceritakan, Wahb Ibn Said Athiyah al-Sulami menceritakan, Abd al-Rahman Ibn Zaid Ibn Aslan menceritakan dari bapaknya, dari Abdillah Ibn Umar r.a dijelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering" (HR Ibnu Majah)

2) Mengalirnya manfaat, jika *ijarah* untuk barang

Apabila terdapat kerusakan pada *ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikit pun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal.

⁴⁵Ibnu Hajar Alasqoni, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*,.... h. 188

- 3) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhinya keseluruhan.
- 4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.⁴⁶

f. Waktu Pembayaran Upah (*Ijarah*)

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan diisyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

Menurut Imam Syafii dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.⁴⁷

g. Berakhirnya Akad Upah mengupah

Pada dasarnya *ijarah* merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat dalam perjajian, *ijarah* tidak diperbolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*,h. 18-21

⁴⁷ Sohari Sahrani & Raufah Abdullah, *Fiqh Muamalah*,h. 172

pertukaran atau timbal balik, bila didapati hal-hal yang mewajibkannya.⁴⁸

Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak.⁴⁹ *Ijarah* berakhir atau batal karena beberapa hal berikut ini:

1. Rusaknya barang yang disewakan

Menurut ulama yang lainnya kerusakan pada barang yang disewakan tidak menyebabkan habisnya *ijarah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.

2. Salah satu dari *al-muta'qidain* (kedua belah pihak melakukan transaksi) meninggal dunia

Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan oleh *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.⁵⁰

Menurut Sayid Sabiq berakhirnya sewa-menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta :Gajah Mada University Press , 2010), h. 75

⁴⁹ Sohari Sahrani & Raufah Abdullah, *Fiqh Muamalah*,.....h. 170

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007), h. 232-233

- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi '*ain*.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang di akadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

2. Air

a. Pengertian Air

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Air merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa air di bumi tidak akan ada kehidupan, air adalah bagian terbesar penyusun tubuh makhluk hidup, tubuh kita mengandung air lebih dari 60%.

Menurut Djasio Sanropie air sangat berpengaruh terhadap kehidupan, baik itu kehidupan manusia maupun binatang, tumbuh-tumbuhan oleh karena itu air merupakan bahan yang sangat vital bagi kehidupan dan juga merupakan sumber dasar untuk kelangsungan kehidupan di atas bumi. Sedangkan air menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) air adalah cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang diperlukan di kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang secara kimiawi mengandung hydrogen dan oksigen.⁵¹

Adapun dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomer 77 Tahun 2001 tentang irigasi, air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.⁵² Sedangkan irigasi merupakan usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.

Kata air dalam al-Quran disebutkan bentuk *mufrad* (tunggal) yaitu *Ma'* dan tidak disebutkan dalam bentuk jamak *amwah* atau *miyah*. Kata *Ma'* yang ada dalam al-Quran tidak seluruhnya dimaksudkan air yang terdiri atas unsur oksigen dan unsur-unsur hydrogen.⁵³

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat di pahami bahwa air adalah elemen-elemen yang berupa cairan yang tidak berwarna dan tidak berbau, yang sangat berguna bagi kebutuhan manusia dan binatang serta tumbuhan yang ada di muka bumi serta merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup terutama bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

⁵¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 2, Cetakan 3,*h. 20

⁵² Peraturan Pemerintah Ri No 77 Tahun 2001 tentang Irigasi Pasal 1, h. 2

⁵³Mochamad Imamudin, "Peranan Air Dalam Perspektif Al-Quran", (Jurnal El-Hayah Vol. 3, No. 1 September 2012), h. 42

b. Macam- Macam Air

Alat utama untuk bersuci dari hadas dan najis adalah air bersih, yaitu sebagai berikut:

- a. Air yang suci dan menyucikan (*thahrur*) yaitu air yang tidak berubah warna, rasa dan baunya walaupun telah bercampur dengan benda najis. Contohnya :

1) *Air Muthlaq*

Yaitu air yang tidak berubah dari bentuk dasarnya. Baik itu air yang turun turun dari langit seperti air hujan, air salju, dan air embun atau air yang mengalir seperti air laut, air sungai, air hujan dan air sumur. Sesuai dengan firman Allah Swt :

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝٤٨

Artinya:”.....Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih “ (QS Al-Furqaan (25) ayat 48)⁵⁴

Allah SWT juga berfirman

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ۝٨

Artinya:Dan Allah Swt menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu (QS Al-Anfal (8) ayat 11)⁵⁵

⁵⁴Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*,....h. 364

⁵⁵Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*,....h. 178

Ayat ini menjelaskan Allah Swt memberikan jawaban terhadap doa dan mengirimkan rasa kantuk dengan melenyapkan rasa takut cemas yang ada didalam hati, dan diantara pertolongannya Allah SWT menurunkan hujan kepadamu dari langit untuk menyucikan dari hadas dan najis dan untuk menyusikan dari godaan setan, yakni meneguhkan karena keteguhan hati adalah dasar bagi keteguhan badankarena bumi sebelum hujan rata dan datar, dan setelah hujan ia menjadi kumpul dan dapat meneguhkan telapak kaki.⁵⁶

2) *Air Musta'mal* (yang telah digunakan)

Yaitu air yang menetes dari anggota badan orang yang berwudhu atau mandi.

3) Air yang bercampur dengan benda yang suci

Yaitu air yang bercampur dengan dedaunan, atau tanah, atau karat tempat penampungan air. Namun benda tersebut tidak mengubah sifat air itu.

4) Air yang bercampur dengan najis namun tidak mengubah sifatnya

Yaitu air yang telah bercampur dengan najis seperti kencing, bangkai atau selainnya namun tidak mengubah salah satu sifat air itu.

⁵⁶Syaik Abdurrahman bin nashir, *Tafsir Al-Quran*,.....h. 170

b. Air najis

Yaitu air yang bercampur dengan najis dan mengubah bentuk salah satu atau sifat air tersebut, baik bau rasa atau warnanya. Air semacam ini adalah najis berdasarkan ijma' (kesepakatan) ulama haram digunakan.⁵⁷

Selain ini, perubahan yang terjadi atas air yang disebabkan oleh sesuatu yang memang tidak dapat dipisahkan darinya. Misalnya, perubahan warna, bau dan rasa pada air yang lama tergenang atau mengalir diantara batu belerang atau karena ikan-ikan didalamnya, atau sesuatu yang sulit dicegah, seperti daun-daun yang berjatuhan dipohon-pohon sekitar air tersebut. Air seperti ini walaupun telah mengalami perubahan, namun masih tetap dianggap suci dan menyucikan.

Termasuk juga dalam kategori air yang suci dan menyucikan air dalam istilah ilmu fiqih disebut *air musta'mal*. *Air musta'mal* adalah air sedikit bekas pakai untuk bersuci (berwudhu atau mandi wajib) air seperti ini masih tetap boleh digunakan untuk bersuci Selama tidak mengalami perubahan dalam salah satu dari ketiga sifat utamanya (yakni warnanya, baunya dan rasanya).⁵⁸

⁵⁷ Abdullah Bahaman, *Fiqih Ibadah Bergambar Belajar Hukum Islam Dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat*, (Jakarta: Mutiara Publishing 2014), h. 12

⁵⁸ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis 1 Menurut Al-Quran, As-Sunah Dan Pendapat Ulama*, (Bandung: kharisma, 2008), h. 48

c. Manfaat Air Bagi Kepentingan Umum

Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala macam kegiatannya, di antara manfaatnya sebagai berikut:

- 1) Sebagai penggerak kincir untuk pembangkit tenaga listrik
- 2) Digunakan dalam kegiatan rumah tangga misalnya, minum, masak mandi, mencuci dan pekerjaan lainnya.
- 3) Air merupakan bahan baku dalam pendinginan dan pemeliharaan pabrik
- 4) Dalam pertanian digunakan untuk irigasi lahan pertanian
- 5) Untuk sarana transportasi umum
- 6) Digunakan dalam kepentingan umum seperti kebersihan jalan, dan pasar, pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi dll
- 7) Keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran dll
- 8) Untuk keperluan peternakan
- 9) Keperluan pelayaran dan lain sebagainya.⁵⁹

B. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian yang berhasil ditemukan adalah penelitian Richo Setyonugroho (2016) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Irigasi Sawah Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten

⁵⁹Dwi, ”Manfaat Air Bagi Kehidupan Manusia” (On-Line) tersedia di: <http://umum-pengertian.blogspot.com/2006/05/manfaat-air-bagi-kehidupan-manusia.html?m=1>, (25 Juli 2019)

Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh dari praktek irigasi sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Sedangkan metode penelitian menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini bahwa tinjauan hukum fiqh praktik *ijarah* pada irigasi sawah yang terjadi di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, sudah memenuhi unsur-unsur syarat dan rukun *ijarah*, hanya proses terjadinya akad dilakukan pengucapan seperti akad jual beli bukan akad *ijarah*, sedangkan praktik akad *ijarahnya* dalam melakukan akad irigasi petugas menerima upah dari petani telah sesuai dengan ketentuan akad *ijarah*.

2. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah penelitian Khusnul Ciptanila Yuni K (2018) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jasa pengairan dengan sistem sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, metode pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara sedangkan metode penelitian menggunakan analisis deskriptif yang kesimpulan diambil melalui komparatif induktif.

Hasil dari penelitian ini bahwa Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun adalah sah karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* dan *marsalah mursalah* karena tukang air begitu banyak mengeluarkan tenaga dari awal sampai akhir panen dan berakad dengan jasanya bukan dengan menjual air sungai, selain itu dari perangkat desa memerlukan pengupahan yang dilakukan.

3. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah Novi Setyowati (2013) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengairan Sawah Di Dusun Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kerjasama dalam praktik pengairan sawah di Dusun Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan normatif dengan teori *musaqah*, metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah ditinjau dalam hukum Islam praktik pengairan sawah di Dusun Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, sudah sah karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi, sedangkan prosesnya kerjasamanya terlaksana dengan baik dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Karena tujuan dari kerja sama adalah untuk mensejahterakan masyarakat petani.

Dengan demikian, dari beberapa skripsi di atas memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang praktik *ijarah* dalam pengairan sawah. Dalam

penelitian sebelumnya penulis menggunakan teori *musaqoh* yaitu proses kerjasama dalam praktik pengairan sawah dimana petani mengelola lahannya sendiri namun dalam proses pengairannya menggunakan pompanisasi, beda dengan penelitian yang penulis teliti dimana menggunakan teori *jiarah* dimana petani mengelola lahannya sendiri, sedangkan proses pengairannya dilakukan oleh petugas irigasi yang diberikan imbalan berupa upah berdasarkan luas lahan pertanian yang dikerjakan.

Meskipun telah disebutkan adanya penelitian yang dilakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus).

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Pekon Sidodadi adalah pekon yang diresmikan tahun 1970 dari pemekaran pekon Tugu Rejo, sejak tahun 1950 sampai tahun 1969 Pekon Sidodadi bernaung di bawah Desa Induk yaitu pekon Tugu Rejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Pada akhir tahun 1969 terpisahlah Pekon Sidodadi dari Desa Induk, sebagai desa persiapan sampai akhir tahun 1970 yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Kasdi.

Pada tahun 1970 Pekon Sidodadi dipercaya untuk mengadakan Pilkades sehingga pada tahun 1970 hingga tahun 1980 Pekon Sidodadi dipimpin oleh Bapak Jatmo Tahun 1980 hingga tahun 1990 Pekon Sidodadi dipimpin oleh Bapak Mursidi, tahun 1990 hingga tahun 2010 Pekon Sidodadi di pimpin oleh bapak Kastolani Tahun 2010 – 2019 Pekon Sidodadi di pimpin oleh Bapak Wasikun hingga sekarang.

2. Keadaan Geografisdesa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Secara administratif Pekon Sidodadi terletak di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dengan luas wilayah 1042 hektar dengan penduduk secara keseluruhan berjumlah 1.245 jiwa yang terdiri dari laki-laki 542 jiwa

dan perempuan 703 jiwa. Adapun batas wilayah Pekon Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Semaka
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Pekon Kacapura
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Pekon Tugu Rejo
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Pekon Garut

Sedangkan kondisi geografis Pekon Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:

- a. Ketinggian dari permukaan laut 48 mdl
- b. Banyaknya curah hujan 10 mm
- c. Suhu rata-rata 25° C
- d. Orbitasi (Jarak Pusat Pemerintahan) sebagai berikut:
 - 1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 7 km lama jarak tempuh keibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor 5 menit
 - 2) Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten 50 km jarak tempuh keibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor 1 jam
 - 3) Jarak dari pusat pemerintahan provinsi 120 km. lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi adalah 3,5 jam

3. Keadaan Demografis Pekon Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Pekon Sidodadi mempunyai jumlah penduduk 1.245 jiwa. Yang terdiri dari laki-laki 542 jiwa dan perempuan 703 jiwa tersebar dalam 4 wilayah dusun dengan perincian tabel berikut

Tabel 1

Jumlah Penduduk Pekon Sidodadi Kecamatan Semaka
Kabupaten Tanggamus

Penduduk				
Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4	Jumlah
350 jiwa	300 jiwa	315 jiwa	280 jiwa	1.245 jiwa

Sumber :profil Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tanggal 1 januari 2016

Tabel 2

Perincian Penduduk Menurut Lulusan Pendidikan Umum

Di Desa Sidodadi Kecamatan Semak Kabupaten Tanggamus.

No .	Pendidikan	Jenis kelamin		Jmh
		L	P	
	Usia 0-3tahun	20	25	49
2	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	19	30	49
3	usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	10	12	22
4	Usia 7-18 tahun yang tidak perah sekolah	2	1	3
5	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	184	215	399
6	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat pernah sekolah	3	2	5
7.	Tamat SD/ sederajat	177	190	367
8	Tamat SMP	98	150	239
9	Tamat SMA	45	60	105
10	TamaT D1/ sederajat	1	2	3
11	Tamat S1 / sederajat	1	3	4
Jumlah		1.245		

Sumber :profil Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tanggal 1 januari 2016

Tabel 3

Perincian Jumlah Penduduk Pekon Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten
Tanggamus

No.	Usia	Jumlah jiwa	Persentase (%)
1	0-17 tahun	366 jiwa	29,39
2	18-56 tahun	690 jiwa	55,42
3	56-keatas	189 jiwa	15,18
Jumlah		1,245 jiwa	100

Sumber :profil Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tanggal 1 januari 2016

4. Keadaan Sosial Ekonomi Di Desa Sidodadi

Kondisi perekonomian atau mata pencaharian masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sebagian besar adalah petani yang sebagian hanya lulus SLTP dan SLTA, sedangkan mata pencaharian sebagai PNS sebagian besar lulus akademi atau dibawah ini Perguruan Tinggi untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel

Tabel 4

Mata Pencaharian Pekon Sidodadi

NO	Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	250	150
2	Buruh tani	100	90
3	PNS	1	2
4	Karyawan	3	1
5	Guru swasta	5	3
6	Peternak	54	40
7	Jasa	20	7
8	Pedagang keliling	13	10
9	Ibu rumah tangga	0	370
10	Perangkat desa	10	4
11	Belum bekerja	46	69
Jumlah total penduduk		1.245	

Sumber : *profil Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tanggal 1 januari 2016*

5. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Manusia mempunyai kebutuhan spiritual dan material usaha untuk menampung kegiatan masyarakat dalam bidang keagamaan, maka umat akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lembaga tersebut, begitu juga karena yang terjadi pada masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Semaka

Kabupaten Tanggamus yang memiliki keyakinan yang tinggi terhadap agama Islam.

Masyarakat Desa Sidodadi mayoritas menganut agama Islam, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang memiliki kepercayaan dan menganut agama lain seperti Kristen dan Hindu. Walaupun berbeda keyakinan, masyarakat Desa Sidodadi memiliki toleransi yang tinggi antar sesamanya. Untuk lebih jelas tentang perincian penduduk menurut agama di Desa Sidodadi dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5

Perincian Penduduk Menurut Agama di Desa Sidodadi

Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1	Islam	600	605
2	Kristen	1	1
3	Katolik	-	-
4	Hindu	20	18
5	Budha	-	-
Jumlah		621	624

Sumber : *profil Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tanggal 1 januari 2016*

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Sidodadi mayoritas beragama Islam berjumlah 1.205 jiwa dan pemeluk agama lain yaitu Kristen dan Hindu berjumlah 48 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam tentunya dapat dijadikan modal dasar bagi pembina keagamaan melalui kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, tentunya sesuai dengan kondisi psikologis dan sosial masyarakat. Adapun jumlah bangunan peribadatan umat Islam di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6

Perincian Bangunan Peribadahan

Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

No.	Bangun Pribadahan	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushola	3
3	Gereja	-
4	Pura	1
Jumlah		6

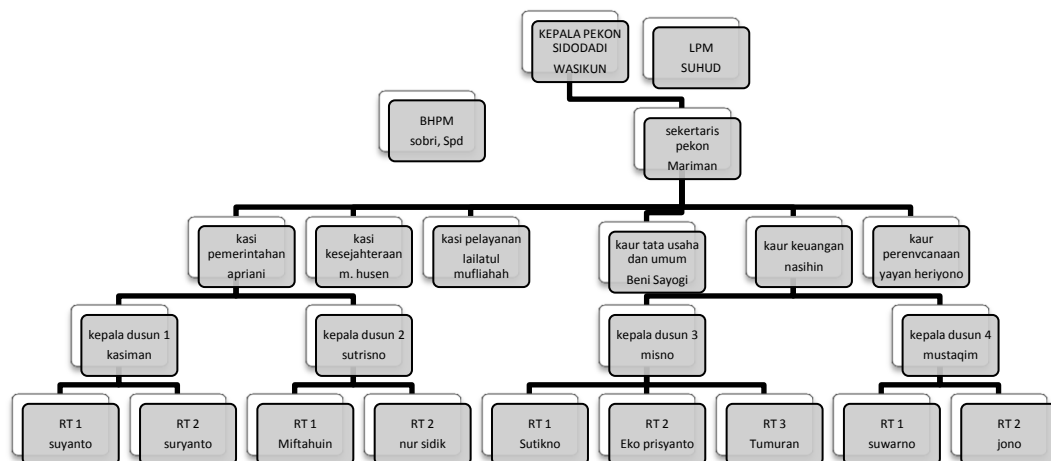
Sumber : *profil desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tanggal 1 januari 2016*

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Stuktur merupakan hal terpenting untuk sebuah organisasi, hal ini dikarenakan sruktur adalah landasan atau dasar kerja, aturan dan gambaran nyata akan pembagian tugas pekerjaan sehingga terciptalah kerjasama yang teratur dan sistematis. Struktur merupakan landasan atau dasar kerja dimaksudkan agar mereka melaksanakan tugasnya dapat terarah dan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan juga untuk menanam sifat tanggung jawab terhadap tugasnya dan sebagai acuan kemana mereka harus berkonsultasi bila terjadi permasalahan di dalam pekerjaan mereka. Adapun struktur organisasi di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:

Tabel 7

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidodadi Kecamatan Semaka
Kabupaten Tanggamus



7. Visi Dan Misi Desa Sidodadi Kecamatan Semaka kabupaten Tanggamus

Visi “Menjadikan Sidodadi menjadi desa yang maju dan berkarakter”

Misi:

- a. Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
- b. Membangun perekonomian yang kokoh.
- c. Memaksimalkan potensi desa dan sumber daya manusia yang ada untuk berkarya.
- d. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, dan budaya dalam bingkai kearifan lokal.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Sistem Pengairan Sawah Pada Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Tanggamus

Secara geografis Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus berbatasan dengan sungai Semaka, letaknya yang strategis, secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian masyarakat, oleh karena itu mayoritas warga Desa Sidodadi berprofesi sebagai petani. Tanaman yang sering di tanam antara lain padi, cabai, sayur-sayuran, jagung, singkong dan lain-lain, dimana tanaman membutuhkan air untuk tumbuh subur.

Sungai merupakan sumber utama dalam pengairan yang dimiliki masyarakat Desa Sidodadi, air dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan pertanian. Pada mulanya masyarakat memanfaatkan air sungai dengan menggunakan alat pompa air, namun karena mahalnya biaya yang dikeluarkan dalam penyedotan air mengakibatkan banyak petani yang merugi karena kondisi pertanian yang masih tertinggal dengan berkurangnya hasil panen yang diperoleh petani, yang disebabkan kurangnya pasokan air yang didapatkan, karena tidak semua petani di Desa Sidodadi mempunyai alat pompa sendiri, sehingga membuat masyarakat tertarik untuk memajukan pertanian di Desa Sidodadi.

Hingga pada akhir tahun 2009-an bapak Kastolani mendirikan jasa pengairan sawah tersebut. Bapak Kastolani selaku pemilik jasa pengairan kemudian mengalihkan pengelolaan irigasi tersebut kepada bapak

Margianto selaku anak dari Kastolani sejak saat itu pengairan sistem lajur mulai berjalan di Desa Sidodadi.¹

Menurut bapak Kastolani sistem pengairan yang sering dilakukan petani di Desa Sidodadi sebagai berikut:

1) Pengairan dengan sistem pompa,

Pompa adalah mesin diesel yang digunakan untuk menyedot air dari sungai ke sawah secara langsung. Dalam prakteknya petani menyewa mesin pompa atau diesel kepada jasa pengairan untuk digunakan sendiri dalam mengairi sawahnya. Pembayaran upahnya langsung setelah menggunakan mesin sewa. Keuntungan yang diperoleh hasil panen yang didapatkan meningkat karena terjaminnya pasokan air, namun mahal biaya produksi yang digunakan petani untuk memompa air karena dalam sekali masa tanam padi, lahan persawahan tidak hanya membutuhkan sekali pompa namun bisa sampai 4-5 kali setiap musimnya.

2) Pengairan dengan sistem lajur.

Lajur yaitu ukuran dalam petakan sawah yang berbentuk memanjang, dengan ukuran yang tidak menentu. dalam praktiknya petani bekerja sama dengan jasa pengairan dalam mengelola lahan pertanian. Pembayaran upah berupa padi berupa 2 bakul setiap 5 lajur atau jika diuangkan senilai Rp. 40.000 perbakul dan pembayarannya ditangguhkan hingga panen dengan syarat jika

¹ Margianto, jasa pengairan Desa Sidodadi, wawancara, Tanggal 8 Agustus 2019

padi yang dihasilkan bagus, dan apabila terjadi gagal panen maka jasa pengairan tidak akan mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan.²

2. Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur

Warga masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sebagian besar permata pencaharian sebagai petani, kurang lebih sekitar 80% dari jumlah keseluruhan sedangkan 20% yang lain bermata pencaharian sebagai pedagang dan sebagainya, secara geografis Desa Sidodadi sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian namun tidak semua masyarakat memiliki lahan, sehingga masyarakat saling berkontribusi untuk mengelola lahan pertanian tersebut dengan membentuk jasa pengairan guna untuk membantu proses irigasi, upah yang didapatkan antara petani dan jasa pengairan yaitu berupa padi atau uang tunai.³

Menurut bapak Juki mengungkapkan sistem lajur adalah pembayaran upah berupa hasil panen atau padi dengan besaran upahnya berdasarkan perlajur sawah, atau petakan lahan. Ukuran perlajur sawah itu tergantung berapa luasnya lahan pertanian tersebut, setiap ukuran tidak tentu karena hanya menyesuaikan panjang dan lebarnya sawah, biasanya $\frac{1}{4}$ hektar bisa dibagi menjadi 5 sekat lajur sawah⁴

²Kastolani, jasa pengairan Desa Sidodadi, *wawancara*, Tanggal 9 Agustus 2019

³ Bawon, petani Desa Sidodadi, *wawancara*, Tanggal 6 Agustus 2019

⁴ Juki petani Desa Sidodadi, *wawancara*, Tanggal 9 Agustus 2019

Menurut bapak Singun, beliau menyatakan bahwa jasa pengairan sawah yang menggunakan pembayaran upah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi telah dikenal sejak lama, masyarakat desa menyebutnya dengan jasa *ili-ili* yaitu jasa yang bergerak dibidang pengairan sawah dengan bayaran berupa padi dari sawah petani. Jasa pengairan sawah dengan sistem lajur dilakukan setiap tahun ketika musim tanam padi, jasa ini digunakan pada musim penghujan khususnya pada musim bercocok tanam.⁵

Menurut bapak Tamin, beliau mengatakan dalam praktik pengupahan jasa pengairan membantu petani untuk memperoleh air dari sungai, yang dipompa menggunakan mesin diesel ke kolam penampungan yang telah disediakan.⁶ Bapak boiman, mengatakan kolam penampungan air ini merupakan milik jasa pengairan, kemudian air dalam kolam penampungan disalurkan dari satu sawah kesawah yang lainnya dengan jalur irigasi, akan tetapi karena luasnya lahan pertanian ada saja sawah yang tidak rata dalam penyaluran airnya sehingga menimbulkan masalah baru bagi petani.⁷

Yang menjadi pertimbangan dari dalam praktik kerjasama seperti ini adalah dapat membantu petani dalam mendapatkan pasokan air sehingga dapat mengelola lahannya. Dengan sistem ini tentu antara petani dan jasa pengairan mendapatkan keuntungan, akan tetapi ada

⁵ Singun, petani Desa Sidodadi, *wawancara*, Tanggal 10 Agustus 2019

⁶ Tamin, petani Desa Sidodadi, *wawancara*, Tanggal, 8 Agustus 2019

⁷ Boiman petani Desa Sidodadi, *wawancara*, Tanggal, 9 Agustus 2019

sebagian petani yang tidak membayarkan upah sesuai dengan kesepakatan sehingga menyebabkan kerugian bagi jasa pengairan.

Adapun menurut bapak Dartun, beliau mengatakan akad yang digunakan dalam kerjasama ini adalah pihak petani berbicara langsung secara lisan kepada jasa pengairan dalam akad ini pihak petani membicarakan mengenai kapan akan di salurkannya air ke sawah, akan tetapi tidak dibicarakan mengenai lama pekerjaan kesepakan akad tersebut.⁸

Bapak Tugimin menyatakan, perjanjian semacam ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sidodadi dari pihak petani kepada jasa pengairan. Dengan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu yang sering dilakukan kesepakatan upah mengupah dengan perjanjian mendapatkan imbalan berupa padi senilai 2 bakul (rinjing), jika di nilai dalam rupiah senilai dengan Rp 40.000 setiap bakulnya dari 5 lajur sawah.⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama petani dengan jasa pengairan, yaitu bapak Kastolani dan bapak Margiyanto selaku pengelola air (jasa pengairan) dan bapak Juki, bapak Singun, bapak Tamin, bapak Boiman, bapak Dartun, bapak Tugimin selaku petani. Pemberian upah atau mekanisme dalam pembagian imbalan tersebut menunggu hingga padi siap di panen. Pembagian dilakukan dengan cara memanen terlebih dahulu padi yang ditanam,

⁸ Dartun petani Desa Sidodadi, *wawancara*, Tanggal, 5 Agustus 2019

⁹ Tugimin petani Desa Sidodadi, *wawancara*, Tanggal, 8 Agustus 2019

kemudian di timbang apakah panen menguntungkan atau tidak. Persentasi pembagian berdasarkan luas lahan pertanian, sehingga jika bapak Kodirin selaku petani mempunyai luas sawah $\frac{1}{2}$ hektar maka, beliau harus membayarkan senilai 4 bakul atau jika diuangkan senilai dengan Rp. 160.000.¹⁰ Berbeda halnya dengan bapak Tarom yang memiliki sawah 1 hektar sehingga beliau memberikan upah kepada pihak jasa pengairan sebesar 8 bakul atau jika diuangkan senilai dengan Rp. 320.000.¹¹ Berikut adalah daftar luas lahan yang di kerjakan oleh jasa pengairan

Tabel 8

Luas Lahan Yang Dikerjakan

No.	Nama petani	Luas lahan	Besaran upah
1.	Singun	$\frac{1}{2}$ hektar	Rp. 160.000
2.	Juki	$\frac{1}{4}$ hektar	Rp. 80.000
3.	Tamin	$\frac{1}{4}$ hektar	Rp. 80.000
4.	Boiman	$\frac{1}{2}$ hektar	Rp. 160.000
5.	Mudiono	1 hektar	Rp. 320.000
6.	Tarom	1 hektar	Rp. 320.000
7.	Darun	$\frac{1}{4}$ hektar	Rp. 80.000
8.	Kodirin	$\frac{1}{2}$ hektar	Rp. 160.000
9.	Tugimin	$\frac{1}{4}$ hektar	Rp. 80.000
10.	Boiman	$\frac{1}{2}$ hektar	Rp. 160.000

Sumber :wawancara dengan pihak petani dan jasa pengairan di Desa Sidodadi

Akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidodadi menimbulkan berbagai dampak menguntungkan maupun merugikan. Adapun dampak menguntungkan dari pihak jasa pengairan melihat upah sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, upah

¹⁰ Kodirin petani Desa Sidodadi, wawancara ,Tanggal,6 Agustus 2019

¹¹ Tarom petani Desa Sidodadi, wawancara, Tanggal,7 Agustus 2019

juga dapat menjadi motivasi dan faktor mendorong manusia untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu upah biasa dijadikan sebagai tolak ukur prestasi kerja, karena upah merupakan suatu dorongan untuk meningkatkan kinerja bagi seseorang. Sedangkan menurut sudut pandang pihak petani menganggap upah merupakan salah satu beban biaya produksi yang harus dikeluarkan selama berjalannya usaha kerja. Adapun dampak yang merugikan yakni pihak jasa pengairan harus menunggu hingga panen agar mendapatkan upah dan dari pihak petani air yang di distribusikan sering tidak merata sehingga menimbulkan masalah baru bagi petani.¹²

Nilai positif yang akan didapatkan jika menggunakan sistem kerjasama ini adalah pihak petani dan jasa pengairan menjalankan kegiatan secara produktif, dalam menjalankan kesepakatan petani mengelola sawahnya dengan bantuan jasa pengairan. Hal ini tentunya dapat menimbulkan tali persaudaraan yang semakin kuat antara petani dan jasa pengairan. Petani secara tidak langsung memberikan ladang pekerjaan bagi orang-orang yang tidak memiliki sawah, yang nantinya dari hasil kerjasama ini dapat memenuhi kebutuhan bagi pengelola air (jasa pengairan) tersebut.

Setelah melakukan wawancara dengan para responden ternyata antara petani ada yang tidak mengikuti tata cara pembayaran tersebut. Tata cara yang dilakukan masyarakat hanya mengikuti tata cara yang dilakukan

¹² Mudiono petani Desa Sidodadi, wawancara, Tanggal, 7 Agustus 2019

masyarakat setempat, seperti menyetujui kesepakatan yang mereka buat tanpa adanya bukti yang tertulis bahwa telah terjadi suatu akad dan masyarakat melakukan sesuatu akad didasarkan saling percaya di antara kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sistem upah mengupah dengan pembayaran berupa padi dapat memberikan keuntungan bagi jasa pengairan sedangkan pihak petani memudahkan dalam menggarap lahan pertanian sendiri dan pemilik sawah secara tidak langsung membantu memenuhi kebutuhan masyarakat lain. Hal ini berbeda dengan sistem pengupahan dalam pengairan sawah pada umumnya.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

1. Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Setelah mengumpulkan data, baik yang didapat dari perpustakaan maupun dari lapangan yang kemudian sudah di jelaskan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa upah merupakan imbalan yang dibayarkan kepada buruh atau pekerja yang telah selesai mengerjakan pekerjaannya. Upah merupakan aspek terpenting dalam suatu hubungan kerja, berbagai pihak dapat melihat upah dari sisinya masing-masing, pihak jasa pengairan melihat upah sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga, secara psikologi harta/keuntungan juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh di pihak lain pengusaha melihat keuntungan dalam hubungan kerjasama sebagai salah satu biaya produksi. Dan pemerintah melihat upah itu satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Meningkatnya produktifitas buruh/pekerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat ketentuan kearifak lokal agar terciptanya keseimbangan antara kedua belah pihak.

Kerjasama dalam bidang irigasi pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Setelah menganalisa data yang telah dikemukakan di BAB II, peneliti merasa

adanya kesenjangan antara teori dengan praktik upah mengupah yang dilakukan oleh masyarakat Sidodadi, yakni sistem pembayaran dalam akad kerjasama dalam bidang pengairan ada sebagian petani yang tidak membayarkan upahnya sesuai dengan kesepakatan. Hal ini merugikan bagi jasa pengairan.

Kerjasama dalam bidang irigasi sudah menjadi tradisi di masyarakat dan sangat terpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong menolong. Masyarakat Sidodadi melakukan kerjasama dengan cara yang biasa mereka lakukan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu akad perjanjian kerja di antara kedua belah pihak, kerjasama ini juga tidak menyebutkan akadnya tidak diperjelas hak dan kewajiban dari pengelola air (jasa pengairan).

Akad sewa jasa yang terjadi pada saat pemilik sawah meminta bantuan pada pengelola air (jasa pengairan) kemudian menjelaskan sistem pengupahan berdasarkan kebiasaan masyarakat Sidodadi yaitu ketika selesai mengaliri air tidak langsung mendapatkan upah melainkan upah yang didapatkan ditangguhkan hingga panen padi tiba, ketika panen tiba maka pengelola akan mendapatkan upah sebesar 2 bakul padi dari setiap 5 lajur sawah yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp 40.000 perbakul padi, dengan syarat panen yang dapatkan harus bagus dan petani mendapatkan keuntungan. Dan ketika pengelola air menyepakati

kerjasama dari pemilik sawah maka terjadilah akad upah mengupah atau *ijarah*.

Pengelola air bekerja mengalir sawah petani sebanyak 4-5 kali dalam setiap musimnya tergantung curah hujan yang serta kelembapan tanah. Selain itu pengelola irigasi melakukan pengecekan secara berkala pada sawah petani agar tidak terjadi penumpukan air pada salah satu sawah. Curah hujan yang tidak menentu juga terdapat perubahan musim dapat mengakibatkan tidak menentunya hasil panen yang didapatkan petani, sehingga panen tidak diketahui bagus atau malah mengalami gagal panen. Hal ini menyebabkan upah yang didapatkan oleh pengelola air tidak dibayarkan. Namun adakalanya saat panen bagus ada sebagian petani yang tidak membayarkan panennya sesuai dengan kesepakatan hal ini yang menyebabkan jasa pengairan mengalami kerugian.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur di Desa Sidodadi

Konsep Islam adalah menjunjung tinggi kebebasan kepada masyarakat untuk bermuamalah dalam segala aspek kehidupan. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dalam fiqih muamalah, yang semuanya adalah hasil dari penggalan ilmu yang terdapat di dalam al-Quran dan hadis.

Islam juga mengatur kesepakatan kerja yang mengatur segala macam baik mengenai hak dan kewajiban antara seorang buruh dan seorang majikan terjadi keseimbangan antara keduanya. Hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam

muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat.

Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya

Berdasarkan kaidah di atas dijelaskan Allah swt memberikan kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam syara' yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan. Hukum syariat ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' yaitu dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar mengenai ujrahnya* serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain. Serta upah sebaiknya langsung di bayarkan setelah pekerjaan selesai. Maka itu yang berlaku dalam suatu perjanjian atau suatu akad adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antar kedua belah pihak agar hak-hak antara keduanya terpenuhi.

Ijarah dalam konsep awal yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya dalam hal ini, bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah dinikmati. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh

dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.

Akad perjanjian upah kerja pengairan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, pada pelaksanaannya terdapat konsep kerja yang sudah jelas dan sudah dibenarkan oleh syariat Islam selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada konsepnya, dimana antara petani meminta bantuan pengelola air untuk mengaliri sawah dengan menjelaskan sistem pembayaran yakni dibayar dengan ditangguhkan jika pengelola air (jasa pengairan) menyetujuinya maka telah terpenuhilah salah satu rukun dan syarat yaitu *shighat* (ijab dan qabul) upah mengupah karena rukun dan syarat dari akad upah mengupah adalah adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Begitu pula dengan *aqidnya* dalam transaksi upah mengupah telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad, yakni orang yang melakukan akad telah dewasa, balig, sehat, dan sudah memiliki kecakapan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk.

Berdasarkan manfaatnya upah kerja pengairan sawah yang terjadi di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus mengandung manfaat yang dapat menciptakan kerukunan terhadap sesama dan dapat menimbulkan saling tolong menolong.

Mengenai objek upah yang ditangguhkan sudah jelas tertera dalam perjanjian bahwa upah akan dibayarkan setelah panen dengan syarat hasil yang didapatkan bagus serta petani mendapatkan keuntungan. Perjanjian pembagian upah tersebut sesuai dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat Sidodadi, yaitu pembayaran upah berupa padi berupa 2 bakul setiap 5 lajur atau jika diuangkan senilai Rp. 40.000 perbakul dan pembayarannya ditangguhkan hingga panen dengan syarat jika padi yang dihasilkan bagus, dan apabila terjadi gagal panen maka jasa pengairan tidak akan mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan. Namun yang terjadi ada sebagian dari petani yang tidak memberikan upahnya sesuai dengan perjanjian sehingga merugikan pihak jasa pengairan.

Dalam rukun dan syarat upah mengenai objek upah telah dijelaskan bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja harus jelas dan diketahui dijelaskan dalam kajian teori. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh “Abd Ar-Razzaq Dari Ibnu Hanifah dan Said Al-Khudri yaitu sebagai berikut:

وَعَنْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ أَجْرُهُ¹

Artinya: Dari Abu said al-khudri ra. bahwa rasulloh Saw bersabda: "Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." (HR. Abdurrazzaq)

¹Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid Jus 2, (Semarang: Mukhtabah Usaha Keluarga), h.

Hadis di atas menjelaskan agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan betapa besar atau kecilnya upah pekerja sehingga tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Kemudian mengenai pembayaran upah tergantung perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayarkan sebelum selesai pekerjaan. Namun akan lebih baik jika upah di bayarkan setelah selesai melakukan pekerjaan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْإِجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)²

Artinya: Dari Abdillah Ibn Umar r.a dijelaskan bahwa rasullah Saw bersabda: "Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah).

Hadis di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang telah melakukan pekerjaan sebaiknya diberikan setelah pekerjaan di selesaikan, karena dengan penangguhan pembayaran upah sama saja penundaan dalam pembayaran utang yang termasuk dalam perbuatan dzalim. Dalam praktik yang terjadi pada masyarakat Sidodadi upah pengairan ditangguhkan sampai panen sudah jelas mengenai jumlah upah yang diberikan.

Merujuk pada konsep bermuamalah praktik upah mengupah yang dilakukan masyarakat Sidodadi telah sesuai dengan hukum Islam karena

² Ibnu Hajar Alasqoni, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Darun Nasyr Al Misyriyyah, t.th), h. 188

upah yang ditanggihkan setelah panen telah di sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun ada sebagian yang tidak melaksanakan upah mengupah sesuai dengan perjanjian hal ini yang menyebabkan terjadinya kerugian yang dialami oleh jasa pengairan.

B. Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian, akad upah kerja pada pengairan sawah di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus perjanjian sesuai dengan yang telah di sepakati yaitu dengan pembayaran upah berupa padi berupa 2 bakul setiap 5 lajur atau jika diuangkan senilai Rp. 40.000 perbakul dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menurut bapak Margiyanto, beliau menyatakan pembayaran upah pengairan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati apabila panen yang didapatkan pemilik sawah bagus ³
2. Menurut bapak Mudiono, beliau mengatakan bahwa pembayaarn upah kerja bisa tidak sesuai dengan perjanjian atau upah yang dibayarkan hanya setengah jika panen yang di dapatkan kurang bagus.⁴
3. Menurut bapak Kastolani, upah pengelola air (jasa irigasi) dapat tidak dibayarkan bila terjadi gagal panen.

³ Margianto, jasa pengairan Desa Sidodadi, *wawancara*, Tanggal 8 Agustus 2019

⁴Mudiono petani Desa Sidodadi, *wawancara* ,Tanggal,7 Agustus 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab yang sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisa data-data yang diperoleh di lapangan, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan upah pengairan dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus adalah akad upah kerja dalam bidang pengairan yang terjadi di masyarakat Sidodadi dengan akad lisan yang berdasarkan kepercayaan antara pemilik sawah (petani) dengan pengelola air (jasa pengairan). Pembayaran berupa 2 bakul padi atau jika diuangkan senilai dengan Rp.40.000 setiap bakulnya dari 5 lajur sawah dengan pembayarannya di tangguhkan sampai panen. Pemberian upah di berikan pemilik sawah setelah panen dengan syarat panen yang diperoleh bagus dan petani mendapatkan keuntungan. Namun sebagian dari petani ada yang tidak membayarkan upah sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati sehingga menyebabkan jasa pengairan mengalami kerugian.
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Praktek upah kerja dalam bidang

pengairan sawah merupakan bentuk akad *ijarah* . Dalam hukum Islam telah menjelaskan bahwa kerjasama dalam bidang pengairan merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang terpenting tidak ada yang dirugikan. Dalam praktik upah mengupah dalam pengairan sawah upah yang dibayarkan ditangguhkan setelah panen sudah sah dalam hukum Islam karena telah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Namun ada sebagian yang tidak membayarkan sesuai dengan akad yang disepakati yakni pemberian upah 2 bakul padi. Hal tersebut tidak sah dalam hukum Islam karena belum memenuhi rukun dan syarat serta dapat merugikan salah satu pihak.

B. Rekomendasi

1. Diharapkan dalam melakukan praktek upah mengupahan antara petani dan jasa pengairan sebaiknya mengikuti kesepakatan yang telah dilakukan walaupun kesepakatan tersebut hanya berdasarkan tradisi. Serta apabila ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran dapat di berikan sanksi baik secara umum maupun syariat Islam.
2. Petani dan jasa pengairan sebaiknya memperhatikan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. .

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman bin nashir, Syaikh *Tafsir Al-Quran*, (Jakarta: DarusHaq ,2016)
- Agama Ri, Departemen *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro,2015).
- Alasqoni, IbnuHajar *BulughulMarom Min AdilatilAhkam*, (Jakarta: DarunNasyr Al Misyriyyah, t.th)
- Al-Bukhori, Muhammad Bin Ismail *Shahih al-Bukhari*, No 2227 (Berikut:DarIbn Katsir,2002)
- Al-Fauzan, Saleh *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta:Gema Imani Press, 2005)
- Agi Husin Al-Munawar, Said *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta:Pemadani,2005)
- Arikunto, Suharsimi *ProsedurPenelitian Suatu Pendidikan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta,1998)
- Ash Shiddieqy, Hasbi *PengantarFiqihMuamalah*, (Jakarta: bulanbintang 1974)
- Astiyah,SitiDarsono, et. al, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Bagir , Muhammad , *FiqihPraktis 1 Menurut Al-Quran , As- Sunah Dan PendapatUlama*, (Bandung:kharisma, 2008)
- Bahaman,Abdullah *FiqihIbadahBergambarBelajarHukum Islam DenganMudah, MenarikEfektif Dan Singkat*, (Jakarta: Mutiara Publishing 2014)
- Bahasa, Pusat *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-4(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008)
- Burhanudin,Nandang *Tafsir Al-BurhanEdisi Al-Ahkam*, (Bandung: Cv Media FitrahRabbani&Ypm Darussalam Kutai, 2010)
- DewanSyariahNasional MUI, *Himpunan Fatwa KeuanganSyariahDewanSyariahNasional MUI*, (Jakarta:erlangga ,2014)

Ghofur Anshori, Abdul Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep Regulasi Dan Implementasi), (Yogyakarta : Gajah Mada University Press , 2010)

Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007)

Hasan Binjai, Syeh H. Abdul Halim *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)

Heykal, Mohammad *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis Dan Praktis* , (Jakarta: Kencana, 2010)

Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid* Jus 2, (Semarang: Mukhtabah Usaha Keluarga)

Ja'far, Kumedi *Hukum Perdata Islam*, Cetakan ke 1 (Lampung : Permatanet, 2016)

Jalaluddin, Al-Imam Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman, *Tafsir Jalalain*, Cetakan II. (Surabaya : PT. Elba Fitrah Mndiri Sejahtera), 2015

Marimin, *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bogor: Grasindo, 2006)

Mubarak, Jaih *Fiqh Muamalah Amaliyah Akad Ijarah Dan Jualah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017)

Muastofa Al-Maragi, Ahmad *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: Cv. Toha Putra Semarang, 1993)

Muhamad, Abdulkadir *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah Bin et. al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* Cetakan Ke-4, (Yogyakarta: Mahtabah Al-Hanif , 2004)

Muslich, Ahmad Wardi *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmad , *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Nawami, Ismail *Fikih Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia , 2012)

Rachmad, Syafii, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

- Rahman, Al-Faruz *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989)
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987)
- Sahrani, Sohari & Raufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet ke-21 (Bandung: Alfabeta CV, 2015)
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Syafei, Rachmad *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Tika, Moh. Pabuda *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2, Cetakan 3, (Jakarta, Balai Pustaka 1994)
- Yusato, M.I dan M. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Peraturan Pemerintah RI No 77 Tahun 2001 tentang Irigasi
- Peraturan Pemerintah RI No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

B. JURNAL

- Ambariyani & Wiwik Damayanti "Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah", (Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 1, Juni 2017)
- Dwi, "Manfaat Air Bagi Kehidupan Manusia" (On-Line) tersedia di: <http://umum.pengertian.blogspotcom/2006/05/manfaat-air-bagi-kehidupan-manusia.html?m=1> (25 Juli 2019)

EkaNurainirachmawati&AbMumin ,Bin AbGhani,
“AkadJualBeliDalamPersepektifFikih Dan PraktiknyaDipasar
Modal Indonesia”, AL ADALAH, Vol XII, No. 4, 2015

Imamudin, Mochamad “Peranan Air DalamPerspektif Al-Quran”, (Jurnal
El-Hayah Vol. 3, No. 1 September 2012)

M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, AL’-ADALAH
Vol. 14, Nomor 2, 2017

Rohman, Adur *Analisis Penerapan Akad Ju’âlah Dalam Multi Level
Marketing (Mlm)*, AL’-ADALAHVol. XIII, 2016

C. HASIL WAWANCARA

Wawancara,Bawo, petani Desa Sidodadi, Tanggal 6 Agustus 2019

Wawancara,Boiman petani Desa Sidodadi,Tanggal, 9 Agustus 2019

Wawancara,Dartun petani Desa Sidodadi Tanggal, 5 Agustus 2019

Wawancara,Juki petani Desa Sidodadi, Tanggal 9 Agustus 2019

Wawancara, Kastolani, jasa pengairan Desa Sidodadi,Tanggal 9 Agustus
2019

Wawancara,Kodirin petani Desa Sidodadi,Tanggal,6 Agustus 2019

Wawancara, Margianto, jasa pengairan Desa Sidodadi,Tanggal 8 Agustus
2019

Wawancara,Mudiono petani Desa Sidodadi,Tanggal,7 Agustus 2019

Wawancara,Singun, petani Desa Sidodadi,Tanggal 10 Agustus 2019

Wawancara, Tamin , petani Desa Sidodadi ,Tanggal, 8 Agustus 2019

Wawancara,Tarom petani Desa Sidodadi,Tanggal,7 Agustus 2019

Wawancara,Tugimin petani Desa Sidodadi, Tanggal, 8 Agustus 2019